

Kebijakan Terhadap Pendidikan Yang Ada Di Indonesia

Ade Rizki Ananda Sinuraya^{1*}, Wiene Surya Putra², Indah Indriani³

STAI Syekh H. Abdul Halim Hasan Al-Ishlahiyah¹²³, Binjai, Indonesia

Email: *aderizkiananda.s06@gmail.com*

Informasi Artikel	Abstract
<p>E-ISSN: 3026-6874 Vol: 1, Nomor: 1, Desember 2023 Halaman :157-164</p> <p>Keywords: Policy Education Institution</p>	<p><i>Education is a very important thing to talk about because it is usually human intelligence seen from how high a persons education is. With the passing of time. Education will also definitely develop in line with developments in science and technology which is increasing rapidly. Policy is a decision made by the government that is general and applies to all members of society. Education policy is the result of decisions taken by considering the relationship between education and other social components. The importance of moving forward education is a must. Education policy is public policy in the field of education. The government is also not playing around in promoting education. Educational institutions are institutions social system that has an organized pattern, where the parts of the existing system are directed to achieve objectives that have been set are based on applicable policies and procedures. Educational institutions required to be able to understand the characteristics of each student. This can be done if the educational institution is given. Authority to independently regulate specific policies that can be applied in implementation activities in educational institutions. This concept has become widely known as management based school (mbs). For this reason, decisions need to be made based on analysis and the needs that occur when analyzing various influencing factors as well as formulating several alternative solutions to the problem, of course presented in the formulation of educational policy analysis models, so that the policies provided are not only benefits one party, but the policy must be able to provide benefits to all stakeholders involved in the world of education.</i></p>

Abstrak

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk dibicarakan sebab biasanya kecerdasan manusia dilihat dari seberapa tinggi seseorang tersebut mengenyam pendidikan. Dengan berkembangnya zaman, pendidikan juga pasti akan semakin berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat. Kebijakan adalah suatu keputusan yang dibuat oleh pemerintah yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh anggota masyarakat. Kebijakan pendidikan merupakan hasil dari keputusan yang diambil dengan mempertimbangkan kaitan pendidikan dengan komponen sosial yang lain. Pentingnya memajukan pendidikan merupakan sebuah kemestian. Kebijakan pendidikan adalah kebijakan publik di bidang pendidikan. Pemerintah juga tidak main-main dalam menggalakkan pendidikan. Lembaga pendidikan merupakan lembaga sosial yang memiliki pola terorganisir, dimana bagian-bagian dari sistem yang ada diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan pada kebijakan dan prosedur yang berlaku. Lembaga pendidikan dituntut untuk mampu memahami karakteristik setiap siswa. Ini dapat dilakukan jika lembaga pendidikan diberi otoritas dalam mengatur secara mandiri kebijakan-kebijakan khusus yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan aktivitas di lembaga pendidikan. Konsep ini telah luas dikenal secara luas dengan istilah Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Untuk itu, perlu diputuskan berdasarkan analisis serta kebutuhan yang terjadi, menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi, serta merumuskan beberapa alternatif pemecahan masalah yang tentunya disajikan dalam formulasi model analisis kebijakan pendidikan, sehingga kebijakan yang diberikan bukan hanya menguntungkan sebelah pihak, namun kebijakan harus dapat memberikan manfaat untuk seluruh *stakeholder* yang terlibat dalam dunia pendidikan.

Kata Kunci : Kebijakan, Pendidikan, Lembaga

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk dibicarakan sebab biasanya kecerdasan manusia dilihat dari seberapa tinggi seseorang tersebut mengenyam pendidikan. Secara singkat pendidikan merupakan produk dari masyarakat. Pendidikan tidak lain merupakan proses transmisi pengetahuan, sikap, kepercayaan, keterampilan, dan aspek perilaku-perilaku lainnya kepada generasi ke generasi. Dengan kata lain, dimana pun kita berada kita pasti akan belajar dan mendapatkan ilmu pengetahuan. Tiap masyarakat selalu berupaya meneruskan kebudayaannya dengan proses adaptasi tertentu sesuai coraknya masing-masing periode zamannya kepada generasi muda dengan cara melalui pendidikan atau secara khusus melalui interaksi sosial. Dengan kata lain, fungsi pendidikan tidak lain adalah sebagai proses sosialisasi.

Dengan berkembangnya zaman, pendidikan juga pasti akan semakin berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat. Pada pendidikan tidak terlepas dari sebuah kebijakan, karena pendidikan merupakan keseluruhan dari sebuah proses, dan hasil dari perumusan langkah-langkah yang menjadi penjabaran visi dan misi pendidikan dalam mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan di masyarakat.

Kebijakan adalah suatu keputusan yang dibuat oleh pemerintah yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh anggota masyarakat. Kebijakan pendidikan merupakan hasil dari keputusan yang diambil dengan mempertimbangkan kaitan pendidikan dengan komponen sosial yang lain. Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan sangat penting untuk kemajuan suatu bangsa, sebab untuk menjadi bangsa yang maju merupakan suatu cita-cita yang diharapkan pada suatu negara. Kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh tingkat pendidikannya, semakin maju pendidikan maka negara juga akan mengalami kemajuan yang pesat.

Pentingnya memajukan pendidikan merupakan sebuah kemestian. Kebijakan pendidikan adalah kebijakan publik di bidang pendidikan. Pemerintah juga tidak main-main dalam menggalakkan pendidikan. Keberhasilan dan pembuatan kebijakan adalah langkah pertama dengan mencakup identifikasi dari bidang umum, analisis, penyusunan sasaran, memutuskan bidang-bidang pelaksanaan, menjelajahi administrasi secara luas, politik dan dimensi masyarakat, negosiasi dan konsultasi dan akhirnya formulasi akhir serta pelaksanaan kebijakan. Secara khusus pembuatan kebijakan adalah suatu hal yang penting dalam hubungan sekolah dengan masyarakat yang dilayani.

Kebijakan pendidikan memiliki tujuan dalam pendidikan, kebijakan itu untuk memberikan kontribusi yang jelas dan terarah. Kebijakan pendidikan harus dibuat oleh seseorang yang berwenang yang ahli dalam bidangnya agar tidak menimbulkan kerusakan pada pendidikan dan lingkungan diluar dari pendidikan. Jika kebijakan pendidikan yang dibuat ini mengandung kesalahan maka dapat dilakukan evaluasi dan jika baik maka akan dapat dipertahankan dan dikembangkan.

METODE

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif yang didapatkan dari tulisan-tulisan para ahli dalam pendidikan yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan yang sangat penting untuk memajukan pendidikan. Dalam penelitian ini, diharapkan dapat menjadi keberhasilan kebijakan pendidikan dalam mengembangkan pendidikan. Subyek yang menjadi sumber utama adalah kebijakan pendidikan yang memiliki tujuan dalam pendidikan. Hal itu didapatkan dengan menganalisa tulisan para ahli dalam pendidikan, dengan membaca buku dan jurnal yang terkait. Buku dan jurnal digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara menggabungkan data-data terkait kebijakan pendidikan dengan cara memahami dan menganalisa sehingga dapat diambil dijadikan sebagai pokok pikiran untuk menjelaskannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan (*policy*) secara etimologi (asal kata) diturunkan dari bahasa Yunani, yaitu *polis* yang artinya kota (*city*). Selanjutnya, kebijakan mengacu kepada cara-cara dari semua bagian pemerintahan mengarahkan untuk mengelola kegiatan mereka. Pengertian atau definisi kebijakan banyak dan beragam, sangat bergantung kepada ahli yang mengemukakannya, model atau pendekatan yang digunakannya, dan ruang lingkup tempat kebijakan tersebut hendak dilaksanakan. Istilah kebijakan (*policy term*), sebagaimana dikatakan Jones digunakan dalam praktik sehari-hari untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda.

Kebijakan pendidikan adalah kebijakan publik di bidang pendidikan. Setiap kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan akan berdampak pada pengambilan keputusan oleh para pembuat kebijakan dalam bidang pendidikan, baik di tingkat nasional maupun daerah dan tingkat satuan pendidikan. Namun, khususnya pada tingkat nasional, para pengambil keputusan khusus masalah pendidikan di tingkat DPR RI adalah Komisi X DPR RI Presiden RI, dan Menteri Pendidikan Nasional RI (pemimpin Departemen Pendidikan Nasional). Sehingga, segala bentuk kebijakan pendidikan nasional yang dihasilkan oleh ketiga elemen ini akan mempengaruhi kebijakan pendidikan di seluruh daerah dan seluruh satuan pendidikan di Indonesia.

Lembaga pendidikan merupakan lembaga sosial yang memiliki pola terorganisir, dimana bagian-bagian dari sistem yang ada diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan pada kebijakan dan prosedur yang berlaku. Lembaga pendidikan dituntut untuk mampu memahami karakteristik setiap siswa. Ini dapat dilakukan jika lembaga pendidikan diberi otoritas dalam mengatur secara mandiri kebijakan-kebijakan khusus yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan aktivitas di lembaga pendidikan. Konsep ini telah luas dikenal secara luas dengan istilah Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).

Kebijakan adalah ketentuan yang berisi prinsip-prinsip untuk memandu tindakan yang akan diambil dengan dasar perencanaan dan konsistensi yang orientasi utamanya adalah untuk pemecahan masalah maupun mencapai sebuah tujuan. Seorang pemimpin diharuskan untuk memiliki kapabilitas yang cukup untuk merancang dan menyusun berbagai aturan maupun kebijakan bagi kemaslahatan masyarakatnya tanpa terkecuali. Berbanding terbalik dengan hal tersebut, dalam implementasinya tidak sedikit pemimpin publik yang kurang secara kapasitasnya dalam mewujudkan kepemimpinannya yang kemudian berdampak pada berkurangnya pengakuan masyarakat terhadap kewenangan kepemimpinan yang diberikan, dan bahkan dampak lebih lanjut yang ditimbulkan adalah terjadinya krisis kepercayaan pada sistem yang tengah berlangsung.

Kebijakan pendidikan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, diarahkan untuk mencapai hal-hal sebagai berikut:

1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya manusia Indonesia berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran pendidikan secara berarti;
2. Meningkatkan kemampuan akademik dan profesional serta meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan sehingga tenaga pendidik mampu berfungsi secara optimal terutama dalam peningkatan pendidikan watak dan budi pekerti agar dapat mengembalikan wibawa lembaga dan tenaga kependidikan;
3. Melakukan pembaharuan sistem pendidikan termasuk pembaharuan kurikulum, berupa diversifikasi kurikulum untuk melayani keberagaman peserta didik, penyusunan kurikulum

yang berlaku nasional dan lokal sesuai dengan kepentingan setempat, serta diversifikasi jenis pendidikan secara profesional;

4. Memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan, serta meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana memadai;
5. Melakukan pembaharuan dan pemantapan sistem pendidikan nasional berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan dan manajemen;
6. Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah untuk memantapkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
7. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin secara terarah, terpadu dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif oleh seluruh komponen bangsa agar generasi muda dapat berkembang secara optimal disertai dengan hak dukungan dan perlindungan sesuai dengan potensinya;
8. Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk teknologi bangsa sendiri dalam dunia usaha, terutama usaha kecil, menengah, dan koperasi.

Tujuan pendidikan Indonesia terdapat pada sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional merupakan sistem yang mengintegrasikan setiap satuan dan aktivitas pendidikan yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional ini dirumuskan melalui sebuah kebijakan yang disebut dengan kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan dengan tujuan untuk menghasilkan sistem pendidikan nasional yang mencirikan bangsa Indonesia. Dikeluarkannya undang-undang tersebut menandakan bahwa pemerintah Indonesia serius dalam mencapai tujuan pendidikan melalui sebuah kebijakan pendidikan.

Pencapaian tujuan pendidikan berpengaruh terhadap mutu pendidikan. Mutu pendidikan tersebut dapat dikelola berdasarkan kebijakan pendidikan yang telah ditetapkan. Maka dari hal ini dibuktikan bahwa kebijakan pendidikan memiliki keterkaitan satu sama lain yang berdampak kepada proses berjalannya sistem pendidikan tersebut. Maka dalam hal kebijakan pendidikan harus dirumuskan dengan memperhatikan ketercapaian tujuan pendidikan tersebut.

Dalam memahami suatu proses kebijakan, terdapat aspek yang sangat penting yaitu implementasi kebijakan. Tolak ukur keberhasilan suatu kebijakan adalah pada tahap implementasi. Implementasi kebijakan lebih bersifat kegiatan praktis, termasuk di dalamnya mengeksekusi dan mengarahkan. Dengan demikian, implementasi kebijakan dapat disebut sebagai rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah sebuah kebijakan ditetapkan, baik yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah-langkah yang strategik, maupun operasional yang ditempuh guna mewujudkan suatu program atau kebijakan menjadi kenyataan, guna mencapai sasaran dari kebijakan yang telah ditetapkan tersebut. Tingkat keberhasilan proses ini akan dipengaruhi berbagai unsur, baik yang bersifat mendukung atau menghambat, serta lingkungan, baik fisik, sosial maupun budaya. Hal yang perlu diwaspadai adalah dalam memilih alternatif untuk memecahkan masalah, sehingga tidak mengganggu pencapaian tujuan pendidikan.

Kebijakan pendidikan memiliki karakteristik yang khusus, yaitu:

1. Memiliki Tujuan Pendidikan

Kebijakan pendidikan haruslah memiliki tujuan, namun lebih khusus tujuan pendidikan tersebut harus jelas dan terarah sehingga dapat memberikan kontribusi pada pendidikan.

2. Memenuhi aspek Legal-Formal

Agar dapat diberlakukan, maka kebijakan pendidikan harus memenuhi pra-syarat agar kebijakan pendidikan diakui dan secara sah berlaku untuk semua wilayah. Syarat yang harus dipenuhi adalah syarat konstitusional sesuai dengan hirarki konstitusi di semua wilayah yang berlaku hingga dinyatakan sah dan resmi diberlakukan di wilayah tersebut. Sehingga dapat dimunculkan kebijakan pendidikan yang legitimat.

3. Memiliki Konsep Operasional

Kebijakan pendidikan sebagai sebuah pedoman yang bersifat umum, haruslah mempunyai manfaat operasional agar dapat diimplementasikan dengan tepat dan sebuah keharusan untuk memperjelas tujuan pendidikan yang ingin dicapai.

4. Dibuat oleh yang berwenang

Kebijakan pendidikan haruslah disusun oleh para ahli dibidangnya yang memiliki wewenang tersebut, sehingga tidak menimbulkan masalah kedepannya dalam pendidikan dan lingkungan di luar pendidikan.

5. Dapat dievaluasi

Kebijakan pendidikan tentunya tidak luput dari proses evaluasi. Jika baik, maka dipertahankan dan dikembangkan. Sedangkan jika masih ada kesalahan dan kekurangan, maka harus bisa diperbaiki.

6. Memiliki sistematika

Kebijakan pendidikan tentunya memiliki sistem, oleh karena itu kebijakan pendidikan harus memiliki sistematika yang jelas serta menyangkut seluruh aspek yang ingin diatur. Sistematika tersebut tentunya dituntut mempunyai efektivitas, efisiensi, dan sustainability yang tinggi agar kebijakan pendidikan tidak bersifat pragmatis, diskriminatif, dan rapuh strukturnya dikarenakan serangkaian faktor yang hilang atau saling bertabrakan satu sama lainnya. Hal tersebut harus diperhatikan agar dalam pelaksanaannya tidak mengakibatkan cacat hukum secara internal dan secara eksternal dapat berkolaborasi dengan kebijakan-kebijakan lain, seperti: kebijakan politik; kebijakan moneter; bahkan kebijakan pendidikan di atasnya atau disamping dan dibawahnya.

Pada kebijakan pendidikan, terdapat pelaksanaan kebijakan pendidikan. Pelaksanaan merupakan kegiatan integral dari pembentukan kebijakan. Pelaksanaan merupakan praktik dari kebijakan itu sendiri. Pada tahapan pelaksanaan itulah dapat dilakukan penilaian, monitoring, dan evaluasi terhadap kebijakan dalam rangka mengambil pelajaran dari penerapan kebijakan tersebut. Proses kebijakan pendidikan dilaksanakan sesuai dengan proses pengambilan keputusan atau kebijakan secara umum, namun dengan memperhatikan sejumlah faktor yang berkaitan erat dengan pendidikan.

Tahapan perumusan kebijakan pendidikan seperti, menganalisis situasi yang terjadi, membuat beberapa pilihan kebijakan, mengevaluasi pilihan kebijakan, membuat keputusan tentang pendidikan, merencanakan penerapan kebijakan, menilai dampak penerapan kebijakan dan menentukan siklus kebijakan selanjutnya.

Setiap pengambilan kebijakan pasti memiliki prosedur dan proses yang melatar belakangi lahirnya kebijakan tersebut, dari awal sampai pasca kebijakan tersebut dikeluarkan. Hal tersebut berlaku juga dalam pengambilan kebijakan pendidikan yang terdiri dari tiga tahapan, yaitu sebagai berikut:

1. Formulasi

Formulasi atau pembuatan kebijakan dalam pemerintahan termasuk aktivitas politis. Dalam konteks ini, aktivitas politis dijelaskan sebagai pembuatan kebijakan yang divisualisasikan.

Aktivitas politis itu berisi serangkaian tahap yang saling bergantung dan diatur menurut urutan waktu, penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan. Formulasi kebijakan mengandung beberapa isi penting yang dijadikan sebagai pedoman tindakan sesuai rencana yang mencakup kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan, jenis dan manfaat yang dihasilkan, pelaksanaan program serta sumber daya yang dikerahkan.

2. Implementasi

Implementasi kebijakan, dimana pada prinsipnya adalah cara yang dilaksanakan agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Implementasi kebijakan adalah serangkaian aktivitas dan keputusan yang memudahkan pernyataan kebijakan dalam formulasi terwujud ke dalam praktik organisasi.

3. Evaluasi

Evaluasi kebijakan dilaksanakan sebagai proses untuk mengetahui sejauh mana keefektifan kebijakan guna dipertanggungjawabkan kepada semua pihak terkait. Dengan kata lain, sejauh mana tujuan kebijakan tersebut telah tercapai. Di sisi lain, evaluasi dipergunakan untuk mengetahui kesenjangan antara harapan atau tujuan dengan kenyataan yang dicapai. Evaluasi adalah langkah menerima umpan balik yang utama dari proses kebijakan. Jadi evaluasi kebijakan memberikan informasi yang membolehkan *stakeholder* mengetahui apa yang terjadi berikutnya dari maksud kebijakan. Evaluasi juga memberikan paparan aktivitas implementasi kebijakan. Pada kompleksitas lebih besar evaluasi dimaksudkan untuk mengidentifikasi tingkat keberhasilan pelaksanaan yang sesuai sasaran. Evaluasi dapat memberikan pemahaman terhadap alasan keberhasilan kebijakan atau kegagalan dan dapat memberikan sasaran terhadap tindakan untuk memberdayakan pencapaian sasaran kebijakan. Tujuan dari evaluasi kebijakan adalah mempelajari pencapaian sasaran dari pengalaman terdahulu, tanpa pengujian pelaksanaan dan hasil usaha, ada sedikit kemungkinan keberhasilan pelaksanaan program.

Terdapat tiga lingkungan yang berperan penting dan berpengaruh dalam pendidikan, yakni keluarga, sekolah dan masyarakat. Hal ini dikarenakan pada hakikatnya setiap individu adalah pendidik, dimana peran sentral orang tua, masyarakat dan pendidik menjadi faktor penting dalam membentuk karakter siswa. Kebijakan dalam pendidikan pun tidak terlepas dari nilai-nilai yang harus melekat pada seorang pembuat kebijakan, di antara nilai-nilai tersebut James Anderson menjabarkannya menjadi lima nilai yakni nilai politik, nilai organisasi, nilai partai, nilai kebijakan, dan nilai ideologi. Kelima nilai ini akan sedikit banyak berpengaruh pada hasil keputusan. Salah satu nilai yang sangat berpengaruh akan bisa dilihat pada sisi evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan dengan menggunakan sistem sistematis atau juga sering disebut sebagai evaluasi ilmiah merupakan evaluasi yang mempunyai kemampuan lebih baik untuk menjalankan evaluasi kebijakan dibandingkan dengan tipe evaluasi yang lain.

Menganalisis kebijakan pendidikan yang dianalisis ternyata kebijakan penyelenggaraan persekolahan. Akibatnya paradigma pendidikan yang universal dipandang secara sempit dan lebih banyak adaptif daripada inisiatif. Kedua, dalam melakukan analisis kebijakan pendidikan kurang kontekstual sebagai suatu kebijakan yang utuh dan terintegrasi secara *empirical, evaluative, normative, predictive* yang memberikan pedoman jelas bagi pengejawentahan formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan.

Sebagai suatu produk, kebijakan pendidikan tidak diformulasikan berdasarkan elemen-elemen yang perlu diintegrasikan secara “sinergi” bukan sebagai komponen yang “terdikotomi”. Artinya apakah rumusan-rumusan kebijakan pendidikan tersebut telah memenuhi kriteria kebijakan pendidikan

didasari oleh asumsi-asumsi politis, banyak pula kebijakan pendidikan yang diputuskan berdasarkan analisis serta kebutuhan yang terjadi di lapangan.

Untuk itu, perlu diputuskan berdasarkan analisis serta kebutuhan yang terjadi, menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi, serta merumuskan beberapa alternatif pemecahan masalah yang tentunya disajikan dalam formulasi model analisis kebijakan pendidikan, sehingga kebijakan yang diberikan bukan hanya menguntungkan sebelah pihak, namun kebijakan harus dapat memberikan manfaat untuk seluruh *stakeholder* yang terlibat dalam dunia pendidikan.

Tujuan kebijakan adalah melakukan intervensi. Oleh karena itu, implementasi kebijakan sebenarnya adalah tindakan intervensi itu sendiri. Implementasi kebijakan dalam konteks manajemen adalah berada dalam kerangka mengorganisasikan, dan mengarahkan. Dengan demikian, ketika kebijakan sudah dibuat maka tugas penting yang mesti dilaksanakan adalah mengorganisasikan dan melaksanakan kepemimpinan untuk mengarahkan pelaksanaan dan melakukan pengendalian pelaksanaan kebijakan tersebut.

KESIMPULAN

Kebijakan pendidikan adalah kebijakan publik di bidang pendidikan. Setiap kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan akan berdampak pada pengambilan keputusan oleh para pembuat kebijakan dalam bidang pendidikan, baik di tingkat nasional maupun daerah dan tingkat satuan pendidikan. Pada kebijakan pendidikan, terdapat pelaksanaan kebijakan pendidikan. Pelaksanaan merupakan kegiatan integral dari pembentukan kebijakan. Pelaksanaan merupakan praktik dari kebijakan itu sendiri. Pada tahapan pelaksanaan itulah dapat dilakukan penilaian, monitoring, dan evaluasi terhadap kebijakan dalam rangka mengambil pelajaran dari penerapan kebijakan tersebut. Proses kebijakan pendidikan dilaksanakan sesuai dengan proses pengambilan keputusan atau kebijakan secara umum, namun dengan memperhatikan sejumlah faktor yang berkaitan erat dengan pendidikan. Tujuan kebijakan adalah melakukan intervensi. Oleh karena itu, implementasi kebijakan sebenarnya adalah tindakan intervensi itu sendiri. Implementasi kebijakan dalam konteks manajemen adalah berada dalam kerangka mengorganisasikan, dan mengarahkan. Dengan demikian, ketika kebijakan sudah dibuat maka tugas penting yang mesti dilaksanakan adalah mengorganisasikan dan melaksanakan kepemimpinan untuk mengarahkan pelaksanaan dan melakukan pengendalian pelaksanaan kebijakan tersebut.

REFERENCES

- Sidiq, Umar & Wiwin Widyawati. (2019). Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Islam Di Indonesia. Ponorogo: CV. NATA KARYA.
<http://repository.iainponorogo.ac.id/483/1/KEBIJAKAN%20PEMERINTAH%20THD%PEND%20ISLAM.pdf>.
- Hafidati, Putri. (2020). Kebijakan Publik Terhadap Pendidikan Di Indonesia Pada Masa Pemerintahan Orde Reformasi. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*. Vol. V. No. 1. 64-79. https://repository.uai.ac.id/wp-content/uploads/2020/03/Jurnal-Magister-Ilmu-Hukum-Vol-V-No.1-Januari-2020_Putri-Hafidati.pdf.
- Erdayani, Rizki, Muslim Afandi & Syed Agung Afandi. (2023). Analisis Kebijakan Desentralisasi Pendidikan Indonesia. *Jurnal Birokrasi & Pemerintahan Daerah*. Vol. 5. No. 3. 55-68. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/ministrate/article/download/29265/pdf>.
- Na'ima, Akbarti, dkk. (2022). Kebijakan Pemerintah Indonesia Bagi Stabilitas Perekonomian Pada Saat Covid-19. *Transformasi: Journal of Economics and Business Management*. Vol. 1. No. 4. 23-33. <https://jurnal2.untagsmg.ac.id/index.php/Transformasi/article/download/237/219>.

- Rozak, Abdul. (2021). Kebijakan Pendidikan Di Indonesia. *Alim Journal of Islamic Education*. Vol. 3. No. 2. 197-208. <https://media.neliti.com/media/publications/363341-none-70d4c60b.pdf>.
- Elwijaya, Fadiyah, dkk. (2021). Konsep Dasar Kebijakan Pendidikan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*. Vol. 6. No. 1. 67-71. <https://jurnal.iicet.org/index.php/jrti/article/download/817/632>.
- Subayil. (2020). Kebijakan Pendidikan Di Era Globalisasi. *Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*. Vol. 3. No. 2. 193-216. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/MaA16/article/download/8720/5123>.
- Nadhiroh, Ulfatun Naili. (2021). Implementasi Kebijakan Pendidikan Islam Di Era New Normal Terhadap Pembentukan Akhlak Peserta Didik. *Jurnal Studi Dan Penelitian Pendidikan Islam*. Vol. 04. No. 02. 152-164. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/fikri/article/download/20540/6765>.
- Oktavia, Windi Sri. (2020). Analisis Kebijakan Pendidikan Tentang Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh Pada Masa Darurat Covid-19. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*. Vol. 1. No. 2. 84-99. <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/produ/article/download/3332/2118>.
- Nurkamiden, Ulfa, Dj. (2021). Kebijakan Pendidikan Di Indonesia Era Pandemi Covid-19. *TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*. Vol. 9. No. 2. 164-169. <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/tjmpi/article/download/2264/1230/6253>.
- Iqbal, Muhammad, dkk. (2023). Pengamatan Kebijakan Pendidikan Pada Madrasah Di Inonesia. *Journal on Education*. Vol. 05. No. 03. 9173-9182. <https://jonedu.org/index.php/joe/article/download/1721/1403>.
- Aziz, Asep Abdul, dkk. (2020). Model Analisis Kebijakan Pendidikan. *Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah*. Vol. 4. No.2. 192-201. <https://ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/tapis/article/download/2575/2011/>.
- Januariani, Mujamil, & Abdul Aziz. (2023). Kebijakan Peningkatan Kualitas Pengelolaan Dan Manajemen Pendidikan Islam Melalui Penerapan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengelolaan Data Yang Efektif. *Al-Mafazi: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*. Vol. 1. No. 1. 64-76. <https://ejournal.stai-mas.ac.id/index.php/mpi/article/download/30/12>.
- Loilatu, Siti Hajar, dkk. (2020). Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Dalam Proses Pembelajaran. *Jurnal Basicedu*. Vol. 4. No. 4. 1408-1422. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v4i4.520>.
- Hussain Sadam, & Andi Eki Dwi Wahyuni. (2023). Kebijakan Pendidikan Pada Perguruan Tinggi Islam: Transformasi STAIN Dan IAIN Menjadi UIN. *Rumah Jurnal UIN Alauddin Makassar*. Vol. 4. No. 1. 15-30. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpk/article/view/39074/17513>.
- Iskandar, Wahyu. (2019). Analisis Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Madrasah. *Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*. Vol. 4. No. 1. 1-22. <https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-madrasah/article/download/109/109>.